# BAB I

PENDAHULUAN

## Latar Belakang Penelitian

Korea Selatan dan Jepang merupakan negara demokrasi terkuat dan paling berkembang di Asia Pasifik. Keduanya memiliki persamaan dalam pendekatan nilai-nilai liberal, supremasi hukum, kebebesan pers dan hal-hal lain yang dapat membentuk gravitasi baru di Asia. Korea Selatan dan Jepang juga menghadapi tantangan regional yang sama, yaitu di kawasan Asia Timur berupa ancaman nuklir Korea Utara dan China yang semakin menguat (Auslin, 2015).

Hubungan bilateral yang terjalin antara Korea Selatan dan Jepang berkembang dalam kerjasama perekonomian, pertahanan dan kehendak untuk menjaga keamanan kawasan. Namun hubungan antara kedua negara ini kerap diwarnai rasa saling curiga dan ketidakpercayaan disebabkan oleh latar belakang historis yang kelam.

Hubungan sejarah Korea Selatan dan Jepang adalah sebagai berikut: Intervensi Jepang dalam urusan kerajaan pre-modern Korea (Joseon); Aneksasi Liancourt Rocks oleh Prefektur Shimane pada 1905; Kolonialisasi Korea oleh Jepang sejak 1910-1945; pelayanan wajib militer secara paksa Korea kepada Jepang selama Perang Dunia II; *The Comfort Women System*/perbudakan seks wanita-wanita Korea untuk militer Jepang selama Perang Dunia II; dan upaya Jepang dalam merevisi artikel IX “*Peace Constitution*” yang secara hukum membatasi pasukan militer Jepang.

Normalisasi hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan pasca Perang Dunia II telah berlangsung lebih dari setengah abad. Namun terdapat beberapa hal yang dapat menganggu hubungan kedua negara menuju hubungan yang benar-bernar normal. Isu-isu tersebut adalah penentangan Korea Selatan terhadap buku pelajaran sekolah dasar Jepang yang isinya dinilai menghapus kesalahan Jepang pada masa perang, dan sengketa tentang wilayah Liancourt Rocks seperti yang telah disebutkan diatas.

Sengketa atas Liancourt Rocks, yang dikenal sebagai Dokdo di Korea Selatan dan Takeshima di Jepang, dianggap oleh kedua negara sebagai bagian dari wilayah mereka masing-masing (Dong-Joon Park & Chubb, 2011). Hal ini selalu menjadi isu yang sangat sensitif dalam hubungan bilateral kedua negara.

Kepulauan Dokdo/Takeshima terdiri dari dua kepulauan utama yaitu Barat dan Timur serta 89 kepulauan-kepulauan di sekitarnya. Total luasnya adalah 187.554 m2 (MOFA-ROK, 2013). Berdasarkan letak georgrafis, kepulauan Dokdo/Takeshima berjarak 87,4 km dari kepulauan Ulleungdo sehingga kepulauan Dokdo dapat di lihat dengan jelas dari kepulauan terdekat Korea Selatan. Sedangkan dari kepulauan Oki berjarak 157,5 km dan kepulauan Dokdo/Takeshima tidak dapat terlihat dari kepulauan Oki yang merupakan kepulauan terdekat Jepang (Wai, 2008).

Kepentingan nasional Korea Selatan dan Jepang didominasi oleh keinginan untuk menguasai secara penuh sumber daya alam laut dan gas hidrat yang terkandung didalamnya.dapat dijadikan sumber energi cadangan (Weinstein, 2006). Sehingga keduanya saling menguatkan klaim mereka terhadap Kepulauan Dokdo/Takeshima untuk mendapatkan status kedaulatan wilayah tersebut.

Korea Selatan memiliki dasar klaim kepemilikan kepulauan Dokdo dengan adanya kedekatan geografis dan fakta sejarah. Mengutip beberapa dokumentasi pemerintah Korea Selatan yang menyatakan bahwa awalnya Dokdo adalah wilayah *Ussanguk* (kepulauan yang tidak berpenghuni) yang kemudian menjadi bagian dari Korea Selatan sejak dinasti Silla pada 512 A. D. (MOFA-ROK: 6)

Kemudian dari pihak Jepang, Jepang secara resmi menganeksasi kepulauan Dokdo/Takeshima pada 22 Februari tahun 1905, lima tahun sebelum Korea dipaksa untuk menyerahkan seluruh kedaulatan teritorial kedalam kontrol kolonial Jepang (Dyke, 2007). Periode pemerintahan Jepang berlangsung selama 35 tahun atau sejak 1910 sampai 1945. Hal ini juga secara tidak langsung membuat wilayah Takeshima/Dokdo jatuh ke tangan Jepamg.

Ketika Jepang menyerah setelah Perang Dunia II, kekalahannya diatur dalam Perjanjian damai Jepang atau yang lebih dikenal dengan Perjanjian San Francisco pada tanggal 8 September 1951 (Fern, 2005). Pasal 2 Perjanjian Damai tersebut tersebut berbunyi: “*Japan recognizing the independence of Korea, renounces all right, title and claim to Korea, including the islands of* Quelpart*,* PortHamilton *and* Dagelet.” (Jepang mengakui Kemerdekaan Korea, dan melepaskan semua hak kepemilikan dan klaim atas Korea, termasuk Kepulauan Quelpart, Pelabuhan Hamilton dan Dagelet.)

Klaimnya diperkuat dengan pernyataan bahwa Kepulauan Takeshima/Dokdo merupakan bagian dari wilayah negaranya berdasarkan Pasal 2 diatas dimana Jepang hanya mengakui kemerdekaan Korea, sedangkan kewajiban untuk mengembalikan Kepulauan Takeshima/Dokdo tidak tercantum dalam Perjanjian Damai tersebut.

Dari hal tersebut Jepang mempunyai kepentingan untuk mengesahkan seutuhnya dan Jepang menginginkan agar tidak terjadi pelanggaran oleh Korea Selatan. Namun Presiden Korea Selatan Syngman Rhee pada 18 Januari 1952 memproklamirkan apa yang disebut dengan Rhee *Line*. Rhee *Line* merupakan garis damai Laut Timur Jepang yang menyatakan kedaulatan Korea Selatan atas perairan yang berbatasan ke Semenanjung Korea, termasuk Dokdo (Takahashi, 2005:4). Hal ini membuat Jepang kemudian kehilangan kontrol atas Kepulauan Takeshima.

Klaim Korea Selatan tersebut kemudian diwujudkan dengan melakukan penguasaan secara fisik dan melakukan pengelolaan secara efektif terhadap Kepulauan Dokdo dalam langkah-langkah seperti yang dimuat dalam *Dokdo Catalogue* oleh MOFA-ROK berikut ini:

1. Menempatkan polisi patroli di sekitar Kepulauan sejak tahun 1954.
2. Pertahanan wilayah perairan dan wilayah udara oleh Militer,
3. Memberlakukan dan mengimplementasikan berbagai peraturan perundang-undangan khusus,
4. Membangun dan mengoperasikan mercusuar dan fasilitas lainnya,
5. Warga Sipil Korea mendiami wilayah Dokdo.

Sebagai balasan atas tindakan klaim sepihak Korea Selatan menyangkut pembentukan Syngman Rhee *Line*, dan hal lainnya seperti menembaki kapal patroli, kegiatan pembangunan struktur serta kegiatan memancing di sekitar Takeshima, Jepang telah berulang kali melakukan protes keras. Pada bulan September 1954, Jepang merujuk sengketa ini ke Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) sebagai upaya penyelesaian. Namun, Korea Selatan menolak proposal tersebut pada bulan Oktober.

Pengajuan sengketa terhadap ICJ menjadi alat diplomatik Jepang sebagai ancaman bagi Korea Selatan. Pada Maret 1962 dalam kesempatan pembicaraan menteri luar negeri, Jepang bermaksud mengajukan kembali sengketa tersebut ke ICJ, tetapi proposal ini sekali lagi tidak diterima oleh Korea Selatan (MOFA-Japan, 2015).

Persengketaan ini kembali memanas pada tanggal 22 Februari tahun 2005. Sekaligus memperingati 1 abad aneksasi Jepang terhadap Korea, Dewan Prefektur Shimane mengesahkan suatu peraturan yang menyatakan bahwa kepulauan Takeshima/Dokdo merupakan bagian dari perfektur Shimane dan pernyataan tersebut diperkuat oleh pemerintah Jepang dengan mendeklarasikannya sebagai Hari Takeshima (Takeshima *day*). Hal ini dianggap sebagai langkah untuk mempertegas klaim Jepang terhadap wilayah Liancourt Rocks (Choe Sang Hun, 2008).

Selanjutnya pada tanggal 24 April tahun 2006, Jepang berencana untuk melakukan survei maritim di perairan sekitar Kepulauan Takeshima/Dokdo. Respon Korea Selatan terhadap hal ini adalah Korea Selatan mengancam akan menangkap penjaga pantai Jepang jika Jepang terus berusaha untuk melakukan survei maritim. Ancaman lainnya adalah Korea Selatan akan mengirim 20 kapal meriam jika survei tersebut tetap diberlakukan. (Nitin Philip, 2013),

Di tahun 2008, Jepang mempertegas kembali klaimnya dengan cara memasukkan kepuluan Dokdo ke dalam buku kurikulum pendidikan sekolah menengah Jepang. Hal ini menunjukan bahwa Jepang melakukan pengenalan untuk anak sekolah menengah atas legalitas Jepang terhadap Kepulauan Takeshima dan negara lain termasuk Korea Selatan tidak berhak atas kepulauan Takeshima dan hal ini menuai protes dari Korea Selatan.

Puncak dari sengketa ini adalah pada kunjungan presiden Lee Myung Bak ke Kepulauan Dokdo/Takeshima pada Agustus 2012. Kebijakan ini menjerumuskan hubungan kedua negara kedalam keadaan antipati yang mendalam (Manyin, 2015). Presiden Lee Myung-bak merupakan presiden Korea Selatan yang pertama kali menginjakkan kaki di Kepulauan Dokdo/Takeshima. Kunjungan ini juga merupakan tanggapan Korea Selatan atas tindakan Jepang yang semakin mengkampanyekan bahwa pulau tersebut adalah milik mereka.

Hal ini sangat memicu kemarahan Jepang sehingga pada bulan Agustus 2012 Jepang merujuk sengketa kedaulatan atas Takeshima ke ICJ sekali lagi, namun Korea Selatan menolak proposal Jepang pada bulan yang sama (MOFA-Japan, 2015).

Keengganan Korea untuk membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional (ICJ) adalah kehilangan 'Dokdo' akan mirip dengan legitimasi *post-facto* dari pemerintahan kolonial Jepang (Dong-Joon Park & Chubb, 2011). Korea Selatan berpikir bahwa menyetujui rujukan segketa ke ICJ berarti menganggap sah klaim Jepang atas kepulauan-kepulauan tersebut. Selama mereka memiliki yurisdiksi yang efektif, maka tidak ada gunanya mengambil risiko akan kehilangan kedaulatan atas Kepulauan Dokdo.

Sedangkan Jepang beranggapan bahwa Kepulauan Dokdo menyimpan suatu tingkat ekonomis yang potensial dan strategis untuk dikelola sehingga penyelesaian kasus sengketa harus didasarkan pada aturan undang-undang secara politis, ekonomis, dan isu-isu simbolis yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Jepang dan Korea Selatan telah membina hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi secara efektif sejak tahun 1965. Pada tahun 1998, Perdana Menteri Jepang Keizo Obuchi dan Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung menandatangani *the Joint Declaration on a New Japan-South Korea Partnership Towards the Twenty-First Century*. Deklarasi bersama ini dibangun untuk meningkatkan hubungan ikatan ekonomi dan politik (MOFA-Japan, 2008).

Dalam bidang ekonomi, Jepang dan Korea Selatan sangat bergantung pada sistem perdagangan global yang andal dan terbuka untuk memberikan stabilitas keuangan dan sumber daya. Kedua negara juga memiliki minat nasional dalam melindungi sumber daya dan lingkungan dari dampak buruk globalisasi dan modernisasi untuk mengarah pada pertumbuhan yang lebih berkelanjutan di masa depan.

Namun dalam perjalanan hubungan bilateral yang diharapkan, bersinggungan dengan “*national* *Interest*” dari kedua negara mengenai sengketa Kepulauan Dokdo/Takeshima. Sehingga sengketa ini mengancam pemulihan hubungan yang dilakukan antara dua negara tetangga yang ditandai oleh kemunduran politik dan ekonomi (Takahashi, 2005).

McLannahan (2012) menyebutkan salah satu kemunduran dalam hubungan ekonomi adalah Korea Selatan dan Jepang menghentikan dan tidak memperbaharui perjanjian pertukaran valuta asing sebesar 57 milyar dollar AS.

Hal yang tersebut diatas mendasari penulis untuk melakukan penelitian mengenai: **IMPLIKASI SENGKETA KEPULAUAN DOKDO/TAKESHIMA TERHADAP HUBUNGAN EKONOMI KOREA SELATAN-JEPANG.**

## Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah bertujuan agar kita mendapatkan sejumlah masalah yang relevan dengan judul penelitian Identifikasi masalah merupakan suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana suatu objek tertentu dapat dikenali sebagai suatu masalah (Suriasumantri, 1998). Adapun identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang klaim Korea Selatan dan Jepang dalam sengketa Kepulauan Dokdo/Takeshima?
2. Bagaimana hubungan ekonomi Korea Selatan dan Jepang?
3. Bagaimana dampak dari sengketa Kepulauan Dokdo/Takeshima terhadap hubungan ekonomi antara Korea Selatan dan Jepang?

### Pembatasan Masalah

Dikarenakan kompleks dan luasnya permasalahan yang telah diungkapkan dalam latar belakang, penulis memandang perlu untuk membatasi ruang lingkup pembahasan terhadap sengketa Kepulauan Dokdo/Takeshima yang berdampak pada hubungan ekonomi Korea Selatan dan Jepang terutama sejak meningkatnya tensi sengketa Kepulauan Dokdo/Takeshima yaitu dari 2012 sampai 2015.

### Perumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang dan identifikasi serta pembatasan masalah adalah sebagai berikut:

“**Bagaimana sengketa Kepulauan Dokdo/Takeshima dapat mempengaruhi hubungan ekonomi Korea Selatan dan Jepang?”**

## Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang klaim Korea Selatan dan Jepang dalam sengketa Kepulauan Dokdo/Takeshima.
2. Untuk mengetahui kondisi ekonomi Korea Selatan dan Jepang dan untuk menjelaskan hubungan ekonomi kedua negara.
3. Untuk memberikan gambaran serta penjelasan mengenai implikasi yang ditimbulkan oleh sengketa Kepulauan Dokdo/Takeshima diantara Korea Selatan dan Jepang terhadap hubungan ekonomi kedua negara.

### Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dedikasi penulis bagi akademisi Ilmu Hubungan Internasional maupun bagi disiplin ilmu terkait lainnya sebagai bahan referensi untuk meneliti lebih lanjut mengenai implikasi dari sengketa Kepulauan Dokdo/Takeshima terhadap hubungan ekonomi Jepang dan Korea Selatan.
2. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menempuh ujian Strata-1 (S1) pada jurusan Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.